



BBM HANYA

PERTAMAX, SETUJU?

Sudah sejak lama pemerintah mengeluhkan bila subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) membebani APBN. Apalagi, sasaran subsidi dinilai kurang tepat. Rencana penghapusan subsidi berdasarkan komoditas pun kembali digaungkan. Terbaru, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan subsidi harus langsung ke rakyat, by name by address. Bila hal tersebut direalisasikan, di SPBU hanya akan ditemukan Pertamina dan Pertamina Turbo. Tak ada lagi jenis Premium atau Peralite. Meski baru wacana, banyak pihak setuju dengan rencana 'Langit Biru' tersebut. Tak hanya menjaga lingkungan, tapi dipastikan bisa menghemat uang negara dan penerima bantuan tidak lagi salah alamat. Untuk diketahui, pemerintah menganggarkan subsidi untuk BBM dan LPG 3 kg pada 2022 sebesar Rp 77,55 triliun, naik 15,9% dari 2021 yang diproyeksikan Rp 66,94 triliun. Anggaran jumbo di tengah pandemi.

(Baca Hal 11)



REALISASI SUBSIDI ENERGI DAN NON ENERGI (2015-2020)

Sumber: Kementerian Keuangan, 6 Januari 2020



28 SEPTEMBER 2021

4 Tahun
LENTERA
MEDIA GROUP

Hari ini 4 tahun Lentera Media hadir menjadi Inspirasi Perubahan. Terimakasih tak terhingga untuk pembaca, mitra dan semua pihak yang selama ini terus mendukung dan menjadi sahabat erat kami. Penghargaan tinggi kami sampaikan kepada mitra yang telah berkenan ikut dalam edisi khusus HUT Lentera Media ke-4 dengan tema : **PANDEMI BELUM USAI, KITA BISA APA?** Nantikan edisi khusus kami di Koran LenteraToday pada Jumat, 1 Oktober 2021. Yang juga bisa dinikmati di www.lenteratoday.com dan Lentera.TV.

GOVERNMENT TODAY

MULAI OKTOBER, BERPERGIAN BISA TANPA PEDULILINDUNGI

Jakarta-Di tengah pro-kontra aplikasi PeduliLindungi ada kabar baik dari pemerintah. Masyarakat bisa bepergian menggunakan kereta api (KA) dan pesawat terbang tanpa aplikasi tersebut mulai Oktober 2021.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan sejumlah opsi bagi masyarakat untuk menunjukkan status vaksinasinya. Pemerintah saat ini mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk melacak mobilitas masyarakat dan mencegah penyebaran Covid-19. Akan tetapi, banyak masyarakat yang kesulitan mengunduh aplikasi PeduliLindungi karena masalah teknis. Bahkan, masih ada orang yang belum memiliki ponsel cerdas.

Atas dasar itu, Kemenkes menyiapkan skema baru dalam pelacakan pergerakan orang selama Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Akan launching di bulan Oktober ini. Ada proses dimana kami memerlukan beberapa model untuk bisa diakses oleh setiap orang," jelas Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan, Setiaji, Senin (27/9).

Ada juga opsi dengan berkolaborasi dengan sejumlah aplikasi lain yang sejatinya sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Misalnya, seperti Gojek, Grab, Traveloka, Tokopedia, Tiket.com, Jaki, LinkAja, dan lainnya. Dengan adanya integrasi antar sesama aplikasi, maka masyarakat tak perlu lagi menggunakan PeduliLindungi.

Sertifikat vaksinasi, hasil tes swab PCR maupun antigen pengguna kereta dan pesawat bisa teridentifikasi tanpa mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Setiaji mengatakan hal itu bisa diketahui melalui nomor NIK saat mereka membeli tiket. "Kalau naik kereta api itu sudah tervalidasi pada saat pesan tiket. Sehingga tanpa menggunakan handphone pun itu bisa diidentifikasi bahwa yang bersangkutan

an sudah memiliki vaksin dan ada hasil tesnya (PCR atau antigen)," jelas dia.

Meski demikian, kebijakan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar maupun mereka yang tidak dapat mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI untuk membantu proses validasi dokumen kesehatan calon pelanggan sejak 23 Juli lalu. Integrasi ini terwujud melalui kerjasama antara KAI dan Kementerian Kesehatan.

"Terintegrasinya aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI bertujuan untuk mempermudah pelanggan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, juga untuk menghindari pemalsuan dokumen," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Positivity Rate Membaik

Terpisah, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan mengatakan positivity rate di Indonesia sudah semakin baik. Dia mengatakan positivity rate sudah di angka 1%. "Ini juga positivity rate sudah di bawah 2%, malah sudah 1%. Ini dalam 7 hari, jadi kami hitung per 7 hari, itu angkanya juga sudah membaik," kata Luhut dalam siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9).

Positivity rate adalah rasio antara jumlah orang yang mendapat hasil positif lewat tes Corona dengan total jumlah tes.

Koordinator PPKM Jawa-Bali ini mengatakan jumlah tes Corona yang dilakukan di Indonesia pun sudah rata-rata di atas 170 ribu tes dalam sehari. "Jadi kalau orang berkomentar itu yang di-testing cuma 30 ribu, sekarang yang di-testing itu tiap hari 170 ribuan per hari, angka itu sudah cukup oke walaupun kami target lebih dari itu,"



Mulai Oktober bulan depan direncanakan calon penumpang Kereta Api tak harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi, tapi bisa memakai aplikasi lain yang telah disetujui pemerintah.

ucap Luhut.

Dia mengatakan pemerintah berupaya mengendalikan laju penularan Corona dengan memperhatikan testing, penggunaan aplikasi PeduliLindungi, vaksinasi, dan jaga jarak. Diketahui, hari ini ada 1.390 kasus baru Corona yang dihasilkan dari tes spesimen 214.591. Saat ini ada 40.270 kasus aktif Corona. Total ada 4.209.403 kasus Corona. Dilaporkan hari ini sudah ada 4.027.248 kasus sembuh dan 141.585 kasus kematian akibat Corona.

Di sisi lain pemerintah juga memperketat kedatangan internasional dari negara yang memiliki kasus Corona kategori tinggi. Negara itu di antaranya Amerika Serikat (AS) dan Turki. "Bahwa kedatangan orang asing juga kami lakukan pengetatan untuk orang dari daerah-daerah yang kita anggap punya kecenderungan tinggi, atau level 4 istilah kita, terdapat beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Turki itu juga dalam kategori cukup tinggi," kata Luhut.

Luhut mengatakan proses karantina bagi orang yang datang dari luar

negeri tetap akan dilakukan. Karantina akan dilakukan selama 8 hari. "Namun proses karantina yang selama ini 8 hari tetap kita lakukan itu, karena dari hasil epidemiolog itu 2 hari sudah kelihatan reaksi kalau dia kena varian Delta ini. Jadi kita masih cukup oke mengenai itu," jelasnya.

Luhut juga menjelaskan kedatangan internasional dari negara yang memiliki kasus Corona rendah. Dia mengatakan orang yang datang dari negara itu masih akan tetap dikarantina. "Dari Saudi Arabia juga tingkat di sana kan rendah, jadi dalam perjalanan kan... karena itu langsung kita bawa dikarantina, jadi sekarang tidak diperiksa di airport, langsung dikarantina," jelasnya.

Pemerintah juga akan mengatur penerbangan internasional yang datang dari luar negeri. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan. "Penerbangan yang datang dari luar negeri akan diatur kedatangannya supaya tidak terjadi penumpukan. Jadi ini untuk menghindari juga hal-hal lain," tuturnya. (ist)

MULAI OKTOBER FITUR PEDULILINDUNGI BISA DIAKSES DI APLIKASI LAIN

- Chief Digital Transformation Office Kemenkes mengatakan saat ini sudah berkoordinasi dengan platform-platform digital seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, Tiket, Dana, Cinema XXI, LinkAja, & Jaki.
- Bagi yang tidak punya ponsel pintar & akan melakukan perjalanan udara maupun dengan kereta tetap bisa teridentifikasi status hasil tes swab PCR maupun antigen dan sertifikat vaksinasinya. Status tersebut bisa diketahui melalui nomor NIK saat membeli tiket.
- Bagi tempat yang tidak terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, masyarakat juga bisa memeriksanya secara mandiri dengan mengakses aplikasi di PeduliLindungi.
- Pada Oktober mendatang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menjadikan fitur pada aplikasi PeduliLindungi bisa diakses di aplikasilain.

PERKEMBANGAN KASUS COVID-19 DI INDONESIA PER 27 SEP 2021

4,209,403	38,291,015
TERKONFIRMASI	TOTAL SPESIMEN DIPERIKSA
4,027,548	87,162,526
SEMBUH	VAKSINASI KE 1
141,585	48,915,476
MENINGGAL	VAKSINASI KE II

Jelang Pemilu 2024

DPR MINTA PLT KEPALA DAERAH DARI TNI-POLRI DIKAJI, KENAPA?



Pemerintah, DPR dan KPU terus mematangkan rencana Pemilu serentak 2024 mendatang di tengah pandemi Corona.

Jakarta-Presiden Joko Widodo akan menjadi penentu pejabat kepala daerah tingkat provinsi untuk daerah yang kepala daerahnya habis masa jabatan sebelum Pilkada 2024. Jokowi akan menunjuk 1 dari 3 nama kandidat yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

DPR pun jauh-jauh hari meminta pemerintah mengkaji rencana pengangkatan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang berasal dari perwira tinggi TNI/Polri. Ada kekhawatiran akan mengurangi sumber daya manusia di kedua institusi tersebut. Sementara kalangan aktivis mengkhawatirkan dwifungsi TNI-Polri yang telah dihapus pascareformasi akan bangkit kembali.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, "Pemerintah perlu memberikan kajian yang mendalam terhadap penempatan TNI/Polri aktif sebagai Plt kepala daerah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/9).

Dia menilai penempatan perwira tinggi TNI/Polri sebagai Plt seluruh kepala daerah menjelang Pilkada 2024 dikhawatirkan akan mengurangi sumber

daya manusia di kedua institusi tersebut. Menurut dia, rencana kebijakan tersebut harus dikomunikasikan pemerintah. "Kajian yang mendalam itu penting sebelum diambil keputusan seperti ini," ujarnya.

Pemerintah pusat membuka opsi untuk menjadikan perwira TNI/Polri sebagai Plt kepala daerah menjelang Pilkada 2024. Mulai tahun 2022, pemerintah pusat akan menunjuk lebih dari 200 pejabat kepala daerah. Penunjukan tersebut merupakan dampak dari Pilkada Serentak 2024 yang menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah di 24 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan mengatakan, saat ini pihaknya belum membahas mengenai wacana penunjukan perwira TNI/Polri sebagai pejabat kepala daerah. Dalam hal ini, khusus sebagai Pj Gubernur. "Hingga saat ini Kemendagri belum membahasnya. Saat ini masih fokus untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024," ujar Benny.

Sebelumnya, wacana mengenai penunjukan TNI/Polri selaku Pj Gubernur mengemukakan kondisi sebelumnya pada 2018 lalu, Komisaris Jenderal (Pol) Mochamad Iriawan ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri Saat itu, Tjahjo Kumolo. Iriawan dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pada 18 Juni 2018.

Tjahjo saat itu mengatakan, ada banyak perwira aktif TNI dan Polri yang bertugas di kementerian dan lembaga negara. Beberapa di antaranya menjabat sebagai direktur jenderal atau bahkan pimpinan lembaga.

Sesuai aturan hukum, pejabat Polri yang sedang bertugas di kementerian atau lembaga itu boleh ditunjuk sebagai pejabat gubernur. Sebagai contoh, sebelumnya Irjen Pol Carlo Tegu di angkat sebagai pejabat Gubernur Sulawesi Barat. Saat itu, Carlo Tegu sedang bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Benny menuturkan, pejabat daerah tingkat provinsi adalah pejabat pemerintahan dengan status pejabat eselon madya atau eselon 1 atau setingkat dirjen. Benny pun mengatakan, pejabat yang bisa menjadi pejabat daerah tidak hanya dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga dari kementerian/lembaga lain. Benny menekankan bahwa penunjukan sudah sesuai dengan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Ia pun menegaskan, proses pemilihan di Kemendagri tidak langsung berbasis penunjukan. Mereka akan melihat kesediaan kandidat pejabat daerah, kemampuan calon pejabat daerah karena juga menanggung tanggung jawab kementerian/ lembaga di instansi bersangkutan, serta kesediaan pimpinan/lembaga calon pejabat daerah.

"Ini yang maksud saya itu akan dibahas satu per satu pada saatnya

nanti untuk menetapkan pejabat kepala daerah ini. Jadi banyak pertimbangannya," kata Benny.

Di saat yang sama, Benny menuturkan, pejabat tingkat kabupaten kota akan setara eselon 2 atau pimpinan tinggi pratama atau setingkat kepala dinas dan sekda. Para pejabat tingkat kabupaten/kota ini akan dipilih oleh pejabat daerah tingkat provinsi dengan cara pejabat daerah tingkat provinsi mengajukan beberapa nama ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditentukan. Pejabat tingkat gubernur bisa memilih pejabat tingkat kabupaten/kota jika suatu daerah mengalami kekosongan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ia juga membenarkan bahwa pejabat kepala daerah bisa lebih dari 1 tahun. Pemerintah akan mengevaluasi pejabat yang bertugas di daerah dengan masa jabatan bisa lebih dari 1 tahun. Namun, semua akan dievaluasi. "Bisa diperpanjang dengan evaluasi. Akan ada evaluasi tentunya," kata Benny.

Takut Orba Bangkit

Terpisah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengkhawatirkan dwifungsi TNI-Polri yang telah dihapus pascareformasi akan bangkit kembali. Wakil Koordinator Kontras Arif Nur Fikri khawatir TNI-Polri terlalu banyak mencampuri urusan sipil. Menurutnya, hal itu pernah terjadi para era Orde Baru (Orba).

"Salah satu alasan dulu dwifungsi ABRI dihapuskan karena saat itu ABRI itu terlalu sibuk mengurus urusan sipil ketimbang mengurus bagaimana tupoksinya dia yang diamanatkan undang-undang. Jangan sampai ini terulang kembali," katanya.

Arif menyampaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah tegas mengatur penunjukan pejabat kepala daerah. UU Pilkada menyebut pejabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya. Adapun pejabat bupati dan wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama.

Selain itu, Undang-Undang TNI dan Polri juga menegaskan aparat TNI-Polri hanya boleh menduduki jabatan sipil jika telah mengundurkan diri. Pengecualian dibuat bagi prajurit TNI aktif yang bertugas di sejumlah kementerian/ lembaga terkait pertahanan.

"Ombudsman juga sudah pernah mengeluarkan laporan terkait rangkap jabatan TNI/Polri. Dari laporan itu, ada indikasi pelanggaran administrasi," tuturnya. "Saya harap presiden membaca laporan Ombudsman itu."(ist)

SISTEM PEMILIHAN PJ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA JELANG PEMILU 2024

PJ GUBERNUR

- Pejabat daerah tingkat provinsi adalah pejabat pemerintahan dengan status pejabat eselon madya atau eselon 1 atau setingkat dirjen.
- Pejabat yang bisa menjadi pejabat daerah tidak hanya dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga dari kementerian/lembaga lain.
- Proses pemilihan di Kemendagri tidak langsung berbasis penunjukan. Mereka akan melihat kesediaan kandidat pejabat daerah, kemampuan calon pejabat daerah karena juga

menanggung tanggung jawab kementerian/ lembaga di instansi bersangkutan, serta kesediaan pimpinan/lembaga calon pejabat daerah.

- Sesuai dengan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
- Kemendagri menyerahkan 3 nama untuk dipilih Presiden

PJ BUPATI/WALIKOTA

- Pejabat tingkat kabupaten kota akan setara

eselon 2 atau pimpinan tinggi pratama atau setingkat kepala dinas dan sekda.

- Para pejabat tingkat kab/kota ini akan dipilih oleh pejabat daerah tingkat provinsi dengan cara pejabat daerah tingkat provinsi mengajukan beberapa nama ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditentukan.
- Pejabat tingkat gubernur bisa memilih pejabat tingkat kab/kota jika suatu daerah alami kekosongan tingkat provinsi dan kab/kota.
- Pejabat kepala daerah bisa lebih dari 1 tahun. Pemerintah akan mengevaluasi pejabat yang bertugas di daerah dengan masa jabatan bisa lebih dari 1 tahun.

Kasus Dugaan Pencemaran Greenfields

**MEDIASI LUAR SIDANG GAGAL,
KUASA HUKUM 'ADU URAT LEHER'**

BLITAR - Kuasa hukum penggugat dan tergugat dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan PT Greenfields 'adu urat leher' saat sidang mediasi ketiga, kasus gugatan Class Action warga kepada PT Greenfields yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Blitar, Senin (27/9). Mereka saling tuding terkait gagalnya mediasi di luar sidang yang diberikan waktu 2 minggu oleh hakim mediator.

Hadir dalam sidang ini kuasa hukum perwakilan warga penggugat, kuasa hukum tergugat PT Greenfields dan perwakilan turut tergugat Gubernur Jatim dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim.

Usai sidang mediasi yang berlangsung lebih dari 1 jam itu, salah satu kuasa hukum warga penggugat, Rudi Puryono menjelaskan keberatan warga terkait undangan mediasi di luar sidang. Diketahui pihak Greenfields mengundang perwakilan warga penggugat, sementara kuasa hukumnya tidak diundang untuk hadir. "Ini artinya tidak ada etika, karena jelas pada saat sidang kalau akan melakukan mediasi diluar persidangan silahkan menghubungi kuasa hukum

penggugat yang nanti kan menghubungi principal (perwakilan warga penggugat) tapi tidak dilakukan," ujar Rudi.

Ditegaskan Rudi apa yang sudah disepakati saat sidang mediasi harus dilaksanakan oleh tergugat, pihaknya tidak menolak adanya mediasi di luar sidang. "Tapi tempatnya jug harus netral, jangan sampai menimbulkan konflik horizontal (antar warga penggugat dan tidak menggugat) seperti yang kita khawatirkan," tegasnya.

Dalam sidang mediasi ketiga ini juga, kuasa hukum warga penggugat sudah menyampaikan ringkasan gugatan sesuai perintah majelis hakim. "Isinya tetap konsisten dengan 3 hal pokok dalam gugata yaitu itu Greenfields harus menyediakan IPAL untuk mengolah limbahnya, mengembalikan dan menjaga kondisi lingkungan dan kompensasi atau ganti rugi warga," ungkapnya.

Secara terpisah kuasa hukum atau legal PT Greenfields yang menghadiri sidang mediasi ketiga, Emilia Fajrin justru menuding kuasa hukum warga penggugat tidak ada itikad baik untuk mencari win win solution. "Karena

kami sudah ada niatan baik, mengundang secara principal juga ada komunikasi dengan para peng-gugat. Tapi kami tunggu sampai sore tidak ada itikad baik, dengan alasan tempatnya tidak netral," kata Emilia.

Ditanya apakah Greenfields akan menawarkan tempat yang netral, menurut Emilia tidak ada omongan apapun. Menurut-nya, pihaknya yang dibuat repot, mencari mereka (penggugat). "Seolah kita yang bersalah, seharusnya kalau ada itikad baik untuk mencari win-win solution. Tapi dari mereka tidak ada ke arah perbaikan, hanya menuntut se-cara material saja," elaknya.

Sidang akan dilanjutkan sidang pada mediasi keempat pada hari Kamis (30/9/2021) mendatang. Dengan agenda tanggapan atas



Kuasa hukum warga penggugat, Rudi Puryono (depan) usai sidang mediasi di PN Blitar, Senin (27/9/2021).

resume peng-gugat, dari tergugat dan turut tergugat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada sidang mediasi kedua 13 September 2021 lalu, hakim mediator PN Blitar, Maimunyah memutuskan memberikan waktu 2 minggu untuk melakukan mediasi diluar persidangan. Saat itu hakim juga meminta antara penggugat dan tergugat, saling komunikasi agar mediasi diluar sidang bisa berjalan dengan baik. (ais)

**KABAR 1.296 KLASTER SEKOLAH
DITEPIS KEMENKES, PTM TETAP DILANJUTKAN**

Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyebut kabar temuan seribuan kluster Covid-19 di sekolah akibat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tidak benar. Menurutnya, PTM tetap perlu diberlangsungkan lantaran terdapat banyak kerugian jangka panjang jika PTM terus-menerus ditunda.

"Kalau (PTM) ini berhasil, kita akan mereplikasi ke aktivitas perdagangan, pariwisata, keagamaan, transportasi, dan sebagainya," terangnya dalam konferensi pers virtual terkait hasil Rapat Terbatas (Ratas) PPKM, Senin (27/9).

"Karena kebetulan ini mulai secara masif dan kita sadar bahwa kita harus melakukan mulai pendidikan tatap muka ini karena banyak long term disbenefit jika kita tunda. Makanya kita fokus sekali melakukan advance surveillance khususnya tatap muka ini," sambungnya.

Ia menegaskan, kabar soal temuan 1.296 sekolah menjadi kluster Covid-19 adalah tidak benar. Sebab berdasarkan data yang diperoleh, temuan kasus di sejumlah sekolah sebenarnya relatif sedikit. Sementara, sekolah baru bisa disebut sebagai kluster jika



Salah satu fasilitas bus sekolah gratis di Jakarta untuk menekan penularan virus corona dengan menyediakan transportasi khusus bagi anak sekolah.

penyebaran Covid-19 terjadinya di sekolah. "Kita harus belajar hidup dengan ini. Saya bicara dengan Pak Nadiem (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), ini normal kita harus belajar dengan ini kita tangani," beber Menkes. "Risk management mesti bagus, bukan kemudian kita takut atau menghindari. Karena kita pasti harus belajar mengajar," pungkasnya.

Hal senada ditegaskan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek Jumeri. Dia mengatakan ada tiga sekolah yang menjadi kluster pasca

penerapan pembelajaran tatap muka (PTM). Angka ini ia sebut masih dalam taraf relatif kecil. "Hasil evaluasi kami memang ada beberapa kluster di September ini diantaranya di SMA 1 Padang Panjang dan SMP 3 dan 4 Mrebet Purbalingga. Ketiga sekolah tersebut sudah dilakukan testing, tracing dan treatment yang tepat dan sejauh ini siswa dalam kondisi yang baik/sehat," kata Jumeri.

Meski begitu, Jumeri mengatakan pemerintah langsung mengambil tindakan dengan menekankan kembali pentingnya disiplin mematuhi standard of procedure (SOP) dalam pembukaan PTM terbatas. Ia mengatakan saat ini, dibutuhkan kolaborasi yang lebih baik dengan dinas kesehatan serta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat untuk pengawasan, pengendalian, dan penanganan PTM di sekolah.

"Untuk memastikan pendataan

penyebaran covid-19 kami akan integrasikan data dengan aplikasi Peduli Lindungi. Saat ini sedang dimatangkan untuk penerapan," kata Jumeri.

Jumeri juga menegaskan laporan bahwa ada ribuan sekolah yang menjadi kluster sekolah adalah tidak tepat. Ia mengatakan angka tersebut adalah akumulasi selama 14 bulan sejak juli 2020. Dari data itu, yang terdata adalah warga sekolah keseluruhan termasuk guru, karyawan, hingga siswa, baik bagi sekolah yang masih pembelajaran jarak jauh maupun yang membuka tatap muka di sekolah.

"Kita perlu membedakan antara kluster penyebaran Covid-19 dengan warga sekolah yang terpapar Covid-19," kata Jumeri.

Jumeri juga mengatakan pasca dibuka kembali pasca PPKM Darurat, sekolah yang ada di level 1-3 diijinkan untuk membuka PTM terbatas. Hal ini dilakukan agar peserta didik yang belum yakin ikut PTM terbatas dilayani belajar dari rumah. "Jadi sekolah masih melaksanakan pembelajaran tatap muka," tegasnya. (ist)

Musrenbang Rancangan Perubahan RPJMD Pemkab Pasuruan 2018-2023

BUPATI IRSYAD AJAK SEMUA PIHAK SINERGI DAN KOLABORATIF SUKSESSEKAN PEMBANGUNAN

PASURUAN- Sinergi dan kolaborasi menjadi strategi penting dalam mensukseskan pembangunan, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Pasuruan Tahun 2018-2023.

“Ada beberapa rumusan strategi agar kita bisa bangkit dari pandemi. Diantaranya, optimalisasi daya wirasaha melalui KEBAL Covid-19 dengan memperkuat fasilitasi pelatihan ketrampilan dan fasilitasi tumbuh kembangnya wirasaha pemula pasca pandemi. Termasuk mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menumbuhkan dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas,” ujar Gus Irsyad—begitu sapaannya.

Untuk diketahui kegiatan dilakukan pada Kamis (23/9/2021). Digelar di dua lokasi yang berbeda secara virtual yakni di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti dan Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, kegiatan



Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf

dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Berikut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan.

Menurut Gus Irsyad, supporting system antar OPD juga harus bergerak berkesinambungan untuk penguatan perekonomian desa. Selain itu juga

INDIKATOR	SEBELUM					SESUDAH	
	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2022	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,73-6	5,73-6	5,73-6	5,73-6	5,73-6	4,23-5,81	4,24-5,81
Persentase Penduduk Miskin	9,40	9,35	9,30	9,25	9,20	10,25-10,38	10,20-10,33
Indeks Kesalahan Sosial	62,30	62,40	62,50	62,60	62,70	62,60	62,70
Indek Wiliamson	0,260	0,255	0,250	0,245	0,240	0,265	0,250
Indeks Reformasi Birokrasi	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	68,00	70,00
Indeks Pembangunan Manusia	68,18	68,90	69,61	70,30	70,98	68,90-70,30	69,61-70,98
Indeks Gini	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,3482 - 0,3473	0,3472-0,3470
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,02	5,08	5,04	5,01	4,89	6,08-5,91	5,79-5,41

mengembangkan daya sosial melalui KEBAL Covid-19. Strateginya dengan memperkuat jaringan kemitraan dengan masyarakat, tokoh agama, komunitas pesantren, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan dan LSM. Hasilnya diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat dongkrak dengan indikator penurunan persentase Penduduk Miskin, membaiknya Indeks Gini dan berkurangnya

Tingkat Pengangguran Terbuka.

Bupati Irsyad juga menyerukan penguatan new normal kepariwisataan daerah. Jika masing-masing Kepala OPD melaksanakannya secara optimal, maka akan mampu mewujudkan visi bersama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023. Yaitu menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing. (adv)



WUJUDKAN MEDICAL TOURISM, WALIKOTA ERI: BEROBAT DI SURABAYA SAJA

SURABAYA -Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewujudkan inovasi baru yaitu Medical Tourism Indonesia. Kota Pahlawan diharapkan menjadi jujugan berobat sekaligus wisata, layaknya beberapa negara yang selama ini menjadi destinasi warga Indonesia saat sakit maupun sekadar medical checkup.

“Kemarin saya bertemu dengan beberapa orang yang habis berobat di luar negeri. Mereka bilang kalau di Surabaya sudah ada diagnosa. Tapi karena belum percaya akhirnya mereka berangkat berobat ke negara lain. Pas sampai di sana, ternyata diagnosanya

sama dengan di sini,” ungkap Walikota Surabaya, Eri Cahyadi di gedung Balai Kota Surabaya, Senin (27/9).

Eri menjelaskan, Surabaya memiliki kekuatan besar di bidang kesehatan. Mulai dari para ahli tenaga kesehatan hingga pilihan rumah sakit yang banyak. Untuk itu, perlu adanya kerjasama agar bisa meningkatkan lagi pelayanan kesehatan, serta wisata kota sebagai pendukung. “Kita akan launching pada tanggal 10 November nanti, dan daftarnya cukup lewat aplikasi Medical Tourism Kota Surabaya,” ujarnya.

Menurutnya, banyak orang masih mempercayai BILA semakin mahal biaya pengobatan maka semakin baik pula diagnosa dan perawatannya. Padahal, lanjutnya, tidak semua biaya mahal itu dijamin bagus. “Kan misalkan ada yang berobat ke Surabaya pasti ada anggota keluarga yang menjaga. Nah mereka bisa juga berwisata di sini. Wisatawan tidak hanya di Surabaya, ada juga Kota Malang dan Batu,” kata Eri.

Dikatakannya, saat ini fasilitas kesehatan yang sudah digandengkan baru sekitar 7 hingga 8 faskes. Ke depan, Pemkot Surabaya akan

menggandeng semua faskes yang ada. “Yang lain masih kita ajak juga. Karena buat saya, semakin banyak rumah sakit yang memberikan pelayanan terbaik maka pasien ataupun keluarga pasti akan merasakan kenyamanan lebih,” pungkas Eri.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jatim, dr Dodo Anondo MPH menilai medical tourism ini salah satu cara untuk membujuk orang-orang yang takut ke rumah sakit. Untuk pilihan rumah sakitnya, Dodo tetap melihat mana rumah sakit yang unggul. Beberapa diantaranya ada RS Dr Soetomo dan RS Airlangga. (Ard)

IMPRESSION

A man in a light-colored police uniform and a dark cap with a yellow emblem stands in a rural setting. He is holding a silver and black motorcycle helmet. Behind him is a green and white motorcycle. The background consists of lush green vegetation and a dirt path.

ANDIK SANTOSO, GURU HONORER JOMBANG

Lalui 11 Km Jalan Terjal
hingga 10 Kali Ganti Motor

Guru merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Ungkapan tersebut sangat cocok menggambarkan sosok Andik Santoso. Meskipun bestatus guru honorer, namun perjuangannya untuk mengajar bikin trenyuh dan patut diacungi dua jempol.

Lokasi mengajarnya di SDN Jipurapah 2, Kabupaten Jombang, Jawa Timur bukan sekadar terpencil, tapi juga sangat sulit dijangkau karena akses jalannya terbatas. Bahkan Andik harus melewati 3 sungai tanpa jembatan agar bisa sampai di lokasi.

"Dari rumah saya ke sekolah, jaraknya sekitar 11 kilometer," kata Andik saat ditemui di rumahnya di Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Dikatakan Andik, wilayah Jipurapah memang lebih dekat ke Lamongan daripada ke pusat kota Jombang. Bahkan, menurutnya, warga daerah itu lebih memilih memenuhi kebutuhan harian hingga layanan kesehatan di Lamongan.

Sekolah yang menjadi tempat Andik mengajar itu berada di Dusun Kedung Dendeng, Desa Jipurapah, Kecamatan Plandaan. Daerah tersebut merupakan salah satu wilayah di pedalaman dan cukup terpencil di Kabupaten Jombang. Dusun Kedung Dendeng berada di sisi barat laut wilayah Kabupaten Jombang, berbatasan langsung dengan wilayah Sukorame, Kabupaten Lamongan. Selain dikelilingi hutan, akses jalan menuju Dusun Kedung Dendeng juga cukup sulit, terutama saat musim hujan.

Andik sendiri sudah melakukan rutinitas itu selama belasan tahun. Tepatnya, sejak Andik memutuskan menjadi guru di SDN Jipurapah 2 pada 2006. Andik mengungkapkan, hanya jenis kendaraan tertentu yang bisa melintasi akses jalan menuju Dusun Kedung Dendeng. Jalan terjal, licin, dan penuh lumpur merupakan kondisi jalan yang harus dilalui Andik menuju ke SDN Jipurapah 2. "Saya pernah sebulan jalan kaki ke sekolah karena kendaraan rusak. Jadi setelah Subuh langsung berangkat.

Kasihannya anak-anak kalau saya tidak datang, siapa yang ngajar," katanya.

Akibat beratnya medan, Andik sudah berganti motor yang digunakan untuk berangkat mengajar lebih dari 10 kali. Apalagi, tak jarang dia harus bolak-balik mengangkut siswanya bila kondisi jalan buruk pasca hujan. "Mereka harus jalan kaki dan menyebrang sungai. Saat kondisi jalan tidak bagus, ya saya pilih gantian mengantar mereka ke sekolah," katanya. Dia bersyukur baru saja ada seorang polisi bernama Purnomo di Kabupaten Lamongan berangkat Ajun Inspektur Polisi Dua alias Aipda yang memberikannya motor trail. "Sangat membantu untuk saya pakai mengajar," katanya.

Diceritakan Andik, menjadi guru honorer sebenarnya bukan menjadi cita-citanya. Kala itu ia baru menamatkan pendidikan SMA. Ada teman ayahnya yang bercerita bila di SDN Jipurapah 2 kondisi memprihatinkan karena tidak ada yang mau mengajar. Saat itu, terdapat 27 siswa dari kelas satu hingga enam di SDN Jipurapah 2. Namun, karena lokasi sekolah yang terpencil, hampir tak ada yang mau ditugaskan mengajar di sana. "Akhirnya saya menemui kepala sekolah, dan sangat dengan senang hati kepala sekolah menerima saya. Waktu itu gurunya cuma tiga orang, termasuk saya," ucap dia.

Pada 2006, kata Andik, guru yang bertugas di sekolah itu hanya tiga orang, termasuk kepala sekolah. Andik kemudian bergabung sebagai orang keempat yang ikut mengajar di SDN Jipurapah 2, sebagai guru honorer.

"Saya lahir di Sukorame, Lamongan, tapi sejak kecil saya ikut nenek yang tinggal di Kedungdendeng. Baru menginjak SMP dan kemudian SMA, saya kembali ikut orangtua di Lamongan," kata Andik.

Sekarang, SDN Jipurapah 2 yang memiliki 37 siswa. Menurut Andik, sebenarnya ada dua akses jalan menuju Dusun Kedung Dendeng hingga ke SDN Jipurapah 2. Kedua akses jalan yang tersedia memiliki rintangan berbeda namun sama-sama berat.

Rute pertama, dari rumah langsung menuju ke arah Dusun Kedung Dendeng, melintasi hutan, menjelajahi jalan terjal, ditambah dengan jalan licin dan berlumpur saat musim hujan. Jika melintasi rute tersebut untuk ke sekolah, Andik memerlukan waktu sekitar 90 menit, dengan jarak tempuh yang lebih pendek.

Sedangkan rute kedua, terdapat akses jalan yang lebih ringan, yakni dari Desa Jipurapah menuju ke arah Dusun Kedung Dendeng. Jarak dari Desa Jipurapah menuju Dusun Kedung Dendeng sekitar 10 kilometer, melintasi hutan namun kondisi medan lebih ringan dibandingkan dengan rute pertama.

Namun, kata Andik, memilih rute kedua juga tidak bisa serta merta dilakukan. Untuk rute kedua, jarak tempuhnya lebih panjang. Selain jarak yang semakin jauh, dia juga harus melewati hutan meski kondisi medan lebih ringan daripada jalur sebelumnya. "Kalau lewat jalur yang satunya, malah semakin berat. Jaraknya tiga kali lipat karena harus memutar lewat Kabuh, Ploso, lalu Plandaan. Terus, jalur masuknya juga tetap harus lewat hutan," ungkapnya. Dia mengatakan waktu tempuh tiap hari yang dibutuhkan antara 1-1,5 jam tergantung kondisi cuaca.

Dia pun rela menjalani tugas berat setiap hari agar proses pendidikan anak-anak Dusun Kedung Dendeng berjalan lancar. "Saya waktu itu mikirnya ya kasihan kalau anak-anak gak ada yang mau ngajar. Dulu, guru-guru PNS gak ada

yang mau ditugaskan ke Kedung Dendeng," kata Andik.

Lantaran baru lulus SMA pada 2006, Andik sembari mengajar juga membagi waktunya untuk melanjutkan kuliah. Dia mengambil jurusan sastra di IKIP Budi Utomo Malang, dan mengaku lulus mendapatkan gelar S-1 usai menempuh pendidikan selama empat tahun. Pasca lulus kuliah, Andik kembali penuh mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mengajar di SDN Juipurapah 2 Jombang.

Dengan status guru honorer, Andik mengaku mendapatkan upah sebesar Rp 500.000 per bulan. "Sebelumnya Rp 350.000, tapi sekarang alhamdulillah sudah naik Rp 500.000. Barusan saja, belum lama. Bahkan, saat 2006 itu, saya sempat hanya mendapat Rp 100.000 per bulan," kata Andik.

Andik mengaku, dirinya harus berjuang mendapat penghasilan tambahan di luar gaji yang diterima, untuk membeli bahan bakar sepeda motor yang ditumpangi olehnya dari kediaman di Lamongan menuju SDN Juipurapah 2 Jombang. "Terkadang ya cari kayu bakar di hutan yang saya lewat, dijual untuk beli bensin," kata Andik.

Andik mengatakan, dirinya sudah sempat empat kali mengikuti tes yang digelar oleh Pemkab setempat untuk menjadi guru tetap. Namun, dari empat tes yang sudah dilakoni tersebut, tidak satupun yang berhasil dilalui dengan hasil maksimal.

Andik mengaku, dirinya juga sudah menempuh kuliah di Universitas Terbuka Jombang dengan mengambil jurusan Pendidikan Guru SD (PGSD), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan. Namun, tetap saja, hingga kini ia masih berstatus sebagai guru honorer. "Belum rezeki, tidak ada yang lolos," tutur Andik. (*)



TRIK MUDAH HILANGKAN NODA MAKEUP PADA PAKAIAN

Makeup dan fashion merupakan dua hal yang penting bagi perempuan. Setiap hari pasti selalu dipakai demi mendapatkan tampilan yang menarik dan cantik. Sayangnya kedua hal ini juga bisa masalah utama yang dihadapi oleh kebanyakan perempuan.

Mulai dari liquid foundation yang memercik pada blouse hingga eyeliner pen yang nggak sengaja mencoret jeans. Noda makeup yang terlihat pada pakaian akan mengganggu tampilan biar terlihat bersih. Tapi tenang saja, ada trik membersihkan makeup berdasarkan jenisnya.

CARA MENGHILANGKAN LIQUID MAKEUP

Liquid makeup yang berbahan dasar cair harus segera dibersihkan apabila terkena pakaian. Contoh liquid makeup diantaranya ada liquid foundation, concealer, sampai highlighter. Pertama siapkan pakaian yang terkena noda liquid makeup, kikis secara perlahan setiap cairan menggunakan bagian belakang sendok. Kemudian oleskan shaving cream pada noda selama lima sampai 10 menit.

Memecah partikel makeup butuh waktu yang cukup lama. Setelah itu, baru bisa dibilas dengan air dingin. Kalau noda belum bisa diulangi lagi. Cuci pakaian dengan tangan terlebih dulu baru gunakan mesin cuci. Kalau

nggak ada shaving cream bisa juga diganti dengan sabun cuci piring yang sudah ditambahkan baking soda dan hairspray.

CARA MENGHILANGKAN CREAM MAKEUP

Hal yang paling ampuh untuk menghilangkan cream makeup membandel pada pakaian adalah detergent. Tapi lebih baik gunakan yang liquid detergent saat menghilangkan cream blush, highlighter, foundation, dan concealer. Dengan mencampurkan satu ons liquid detergent, satu ons air, dan beberapa tetes nail polish remover.

Setelah itu, tekan kain lap putih ke dalam larutan dan oleskan kain ke noda berpigmen. Lakukan secara perlahan agar noda hilang. Sedangkan untuk cream lipstick yang terkenal susah hilang. Bisa menggunakan alkohol dan gerakan blotting.

CARA MENGHILANGKAN POWDER MAKEUP

Terakhir trik saat menghilangkan powder makeup seperti setting powder dan eyeshadow, bisa pakai hairdryer dengan mengarahkannya langsung ke noda. Lakukan pada cool setting lalu arahkan pada noda, nanti lama kelamaan akan hilang. Kalau noda masih tersisa, jangan digosok. Lebih baik segera cuci dengan mesin cuci. Gampangkan?(ist)



Sumber: Pixels / CanvaPro

NODA KOSMETIK YANG SERING NEMPEL DI BAJU

1. Noda eyeliner

Terkadang tanpa sengaja noda eyeliner bisa meninggalkan noda di baju kesayanganmu, terutama jika pakaian berwarna putih. Cara membersihkannya dengan cairan pencuci piring, sebab sabun cuci piring tidak akan merusak sebagian besar jenis kain.

Cobalah tuangkan sabun pada area kecil yang terkena noda eyeliner, gunakan jari telunjuk untuk me-ratakan sabun. Namun pilihlah sabun cuci piring dengan formula pembersih lemak. Lalu tepuk-tepuk pakaian dengan handuk bersih. Selanjutnya biarkan noda meresap ke dalam pakaian selama 10-15 menit. Dengan begitu sabun dapat meng-hilangkan noda eyeliner tanpa meng-haruskan mencuci pakaian tersebut.

2. Noda foundation

Penggunaan foundation biasanya untuk menutup noda dan minyak pada

wajah. Namun foundation pun sering diaplikasikan secara merata sampai bagian leher, sehingga tak jarang meninggalkan noda di kerah baju. Noda coklat di baju akibat foundation, pastinya akan mengganggu penampilanmu. Sementara untuk menghapus noda makeup tersebut di pakaian hanya dengan menggunakan shaving cream atau krim cukur.

Mulailah membersihkan noda foundation yang berbentuk bubuk atau cair dengan menempelkan tisu yang telah diberi krim cukur, lalu tepuk-tepuk lembut ke bagian yang bernoda. Krim cukur bisa jadi solusi untuk membersihkan noda bedak atau foundation di pakaian. Tapi tidak menggosoknya secara kasar agar tekstur kain bajumu tetap dalam kondisi baik.

3. Noda lipstick

Noda satu ini paling sering terjadi, terkadang tidak sengaja lipstick yang

sedang kamu pakai menempel di baju. Jangan khawatir, kamu bisa menggunakan cara tepat dengan hair spray. Semprotkanlah hair spray pada bagian noda lipstick di bajumu, kemudian diamkan selama 10 menit. Selanjutnya bersihkan perlahan dengan spons dan cuci baju seperti biasa.

Sementara opsi lainnya dapat dihilangkan dengan detergen cair, pakailah handuk bersih untuk menggosok perlahan yang sudah ditetesi sabun cair ke noda lipstick dan diamkan selama 10 hingga 15 menit.

4. Noda eye shadow atau blush on

Namun jangan langsung melemparkan pakaianmu ke mesin cuci, tapi cobalah menggunakan cara tepat untuk menghilangkan noda riasan tanpa harus mencucinya. Sebab eye shadow atau blush on merupakan non-oily makeup yang mudah dibersihkan. Pertama-tama hapus

noda menggunakan kuas terlebih dahulu, selanjutnya gunakan tisu basah. Tapi jangan menggosoknya terlalu keras agar tidak memperparah noda atau merusak tekstur pakaian. Tekanlah noda tersebut secara perlahan dan melingkar, lakukan langkah ini selama beberapa menit. Setelah itu cuci pakaianmu seperti biasa.

5. Noda maskara

Maskara adalah makeup berbahan dasar minyak dan pemakaiannya juga kerap kali menjadi masalah karena mengenai pakaian. Untuk membersihkannya kamu bisa menggunakan makeup remover (oil free) untuk hilangkan sisa-sisa maskara.

Usapkanlah makeup remover pada noda tersebut, tepuk-tepuk dan tekan-tekan nodanya. Hindari menggosok noda maskara di bajumu, hal itu justru akan membuat nodanya menyebar. Ulangi cara ini sampai noda maskara terangkat semua. (ist)

PENGGUNA TELEGRAM WASPADA! KEJAHATAN SIBER MAKIN MERAJALELA

Aplikasi messaging Telegram menjagokan privasi dan enkripsi sebagai fitur utamanya. Tapi fitur-fitur ini justru disalahgunakan oleh penjahat siber yang makin tumbuh subur di Telegram.

Menurut laporan dari perusahaan keamanan siber Cyberint untuk Financial Times, hacker beramai-ramai pindah dari dark web ke Telegram untuk menjual dan berbagi data pengguna yang dicuri atau bocor. Telegram dipilih karena mudah digunakan dan tidak dimoderasi dengan ketat.

Aplikasi besutan Pavel Durov ini juga memiliki fitur secret chats yang menggunakan enkripsi end-to-end sebagai fitur privasi tambahan. Meski grup Telegram tidak memiliki fitur yang sama, pengguna tetap harus memiliki link atau undangan untuk bisa bergabung. Grup Telegram juga bisa diisi hingga 20.000 anggota.

Fitur-fitur ini yang membuat Telegram dilirik oleh penjahat siber. Analisis Cyberint Tal Samra mengatakan penggunaan Telegram untuk aktivitas kejahatan siber meningkat hingga lebih dari 100%."Layanan pesan terenkripsinya semakin populer di kalangan pelaku ancaman siber yang melakukan aktivitas penipuan dan menjual data curian... karena lebih nyaman digunakan ketimbang dark web," kata Samra, seperti dikutip dari Mashable.

Perpindahan penjahat siber ke Telegram ternyata turut dipengaruhi oleh WhatsApp. Telegram dan WhatsApp sebelumnya dipilih oleh pengguna karena menawarkan tingkat privasi yang lebih tinggi berkat enkripsi end-to-end.

Tapi WhatsApp belum lama ini mengeluarkan kebijakan privasi terbarunya yang kontroversial. Penggunaannya pun banyak yang pindah ke Telegram, termasuk para penjahat siber. Dalam laporannya, Cyberint me-



menemukan istilah hacker 'Email:pass' dan 'Combo' semakin banyak digunakan di Telegram, bahkan meningkat hingga empat kali lipat di tahun 2020 dan 2021.

Mereka juga menemukan channel publik bernama 'combolist' yang digunakan untuk menjual dan berbagi data pribadi curian. Channel tersebut pernah memiliki sekitar 47.000 anggota dan saat ini telah dihapus oleh Telegram setelah menerima laporan dari Financial Times.

Beberapa channel data dump di Telegram berisi sekitar 300.000 sampai 600.000 kombinasi email dan password untuk layanan gaming dan email. Cyberint juga menemukan channel yang digunakan untuk menjual informasi keuangan, dokumen pribadi, panduan hacking, dan lain-lain.

Dalam keterangan resminya, Telegram mengatakan mereka memiliki kebijakan untuk menghapus

data pribadi yang dibagikan tanpa izin. Telegram juga mengklaim para moderator mereka telah menghapus 100.000 komunitas publik yang melanggar aturan mereka setiap harinya.

PENGGUNA MELONJAK

Untuk diketahui, Aplikasi messaging populer Telegram sudah diunduh lebih dari satu miliar kali di seluruh dunia. Masuknya Telegram ke dalam klub elit ini diumumkan oleh perusahaan analitik Sensor Tower.

Dalam laporannya, Sensor Tower, sama seperti pesaing utamanya, WhatsApp, India merupakan pasar terbesar bagi Telegram yang menyumbangkan 22% dari total instalasi."(India) diikuti oleh Rusia dan Indonesia, yang mewakili sekitar 10% dan 8% dari total instalasi," kata Sensor Tower dalam laporannya, seperti dikutip dari TechCrunch.

"Instalasi aplikasi meningkat pada

2021, mencapai sekitar 214,7 juta instalasi di paruh pertama 2021, naik 61% year-over-year dari 133 juta di H1 2020," sambungnya. Perlu dicatat bahwa jumlah download tidak sama dengan jumlah pengguna aktif. Telegram sebelumnya mengumumkan telah memiliki 500 juta pengguna aktif bulanan sejak awal tahun ini.

Melonjaknya jumlah pengguna Telegram di tahun 2021 dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya pengumuman kebijakan privasi terbaru WhatsApp yang kontroversial. Sejak WhatsApp mengumumkan kebijakan tersebut pada awal tahun ini, pengguna mereka yang tidak menyetujui aturan itu langsung berpindah ke Telegram dan Signal.

Tapi popularitas Telegram masih jauh ketinggalan dibandingkan WhatsApp. Saat ini WhatsApp telah diunduh lebih dari lima miliar kali hanya di Android, dan memiliki dua miliar pengguna aktif di seluruh dunia. (ist)

JANGAN SAMPAI SALAH PILIH

MASKER WAJAH! SESUAIKAN JENIS KULIT

Berbeda jenis kulit maka berbeda pula masker wajah yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan setiap jenis masker wajah memiliki kandungan yang dapat bekerja dengan baik jika digunakan secara benar pada kulit yang tepat.

Sayangnya, tak semua orang jeli dalam memahami perbedaan dari setiap jenis kulit terhadap masker yang digunakan. Akibatnya, wajah malah mudah bermasalah dan masker yang kamu pakai tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Bagi kamu yang masih bingung, berikut Beautynesia telah merangkum tips memilih masker wajah sesuai dengan jenis kulit. Seperti apa ya kira-kira? Yuk simak artikelnya berikut ini!

KULIT BERMINYAK

Berbagai bahan seperti tee tree dan charcoal bisa jadi pilihan utama dalam mengontrol sebum pada wajah. Pastikan masker wajah mengandung bahan pengontrol minyak/ Foto: Pinterest.com/Love-and-wisdom

Salah satu pemicu utama datangnya jerawat ialah kadar minyak yang berlebihan pada kulit. Guna menghindari datangnya masalah, kamu membutuhkan masker yang mampu mengontrol produksi minyak pada kulit wajahmu.

Pilihlah beragam produk masker dengan kandungan alami seperti charcoal hingga tea tree yang dikenal berkhasiat untuk merawat wajah berminyak. Bahan-bahan tersebut juga diketahui mampu membersihkan wajah hingga ke pori-pori, sehingga tidak ada lagi kotoran yang bersarang pada kulit wajahmu.

KULIT KERING

Lain halnya dengan kulit berminyak, wajah yang cenderung kering sebaiknya memakai produk yang kaya



akan air agar wajah kembali terhidrasi. Adapun jenis masker yang paling direkomendasikan berupa hydrogel, berformula krim, atau oil based mask yang mengandung banyak bahan pelembap.

Jika kulitmu kering cenderung sensitif, kamu bisa menggunakan masker dengan kandungan alami seperti vitamin E dan minyak zaitun. Wajah pun akan kembali lembap dan terhindar dari risiko iritasi.

KULIT SENSITIF

Bagi pemilik kulit sensitif, sebisa mungkin carilah masker yang tidak mengandung bahan aktif yang cukup keras. Risiko yang relatif lebih besar membuat perempuan dengan kulit sensitif dituntut mesti ekstra hati-hati, dalam memilih produk yang digunakan. Salah sedikit saja dalam memilih dapat memunculkan reaksi yang berlebihan dan berbahaya untuk kesehatan kulit.

Demi menjaga kesehatan kulit, ada baiknya kamu memilih produk masker yang mengandung bahan alami yang dapat menenangkan kulit, seperti mineral ataupun kandungan teh seperti green tea. Pastikan juga masker tersebut tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat memicu alergi pada kulit wajahmu.

KULIT NORMAL

Kamu akan lebih leluasa dalam memilih masker jika tergolong pada kondisi kulit yang normal. Beragam jenis masker seperti clay mask, sheet mask hingga krim dinilai cocok dan aman untuk digunakan oleh kulit normal. Jika masih ragu, kamu bisa memilih masker sesuai dengan kebutuhan pada kulitmu saat itu. Jika terasa sedikit kering pilihlah masker berbasis krim agar senantiasa lembap. Namun jika wajah sedang berminyak, carilah masker wajah berjenis clay mask dengan kandungan tea tree ataupun charcoal.

KULIT KOMBINASI

Berada di zona tengah antara kulit kering dan berminyak tentunya menimbulkan kebingungan dalam memilih masker. Penggunaan yang asal dapat membuat kondisi kulit tidak seimbang dan jauh lebih parah dari sebelumnya.

Dilansir dari laman Life Style Asia, kamu bisa menggunakan dua buah masker yang dapat mengontrol minyak namun tetap menghidrasi kulit. Sebagai yang utama, gunakanlah masker dengan kandungan glikolat atau asam laktat untuk mengangkat minyak pada wajah. Setelah itu, lengkapi dengan masker berbasis



gel agar kulit tetap lembap dan tidak kering.

KULIT BERJERAWAT

Jenis kulit berjerawat cenderung mudah iritasi dan memerah ketika memakai produk dengan kandungan aktif yang cukup keras. Lalu, bagaimana jerawat dapat bersih, jika bahan aktif yang seharusnya membasmi kotoran malah tidak sesuai dengan kulit wajahmu?

Sebagai jalan keluarnya, pilihlah masker wajah dengan kandungan bahan yang dapat membersihkan penumpukan pori-pori pada wajah sekaligus menenangkan kulit. Dilansir dari laman Forbes, kamu bisa menggunakan tea tree oil atau salicylic acid dalam bentuk clay mask. Dengan begitu, kotoran dapat hilang sempurna dan kulit tetap terhidrasi secara baik.

Kulitmu tipe yang mana? segera cari masker yang sesuai ya. (ist)



BBM Hanya Pertamina, ... (dari hal 1)

Pemerintah selama ini memberikan subsidi energi, baik untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, sehingga orang kaya pun bisa mengakses.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun mendorong agar pemerintah mengubah skema pemberian subsidi. Artinya, subsidi sebaiknya diubah menjadi langsung berbasis pada orang atau warga yang berhak menerima, bukan lagi pada komoditas, sehingga subsidi menjadi lebih tepat sasaran. "Intinya subsidi sebaiknya langsung ke rakyat, bukan di barang," ungkapnya, Senin (27/9).

Ahok menyebut, jika subsidi langsung diberikan kepada masyarakat, kemungkinan ke depannya tidak ada lagi bensin jenis Premium atau Peralite yang dijual, melainkan langsung berupa bensin dengan minimal nilai oktan (RON) 92 atau Pertamina maupun Pertamina Turbo (RON 98). "Jika subsidi bisa langsung ke rakyat, mungkin ke depannya tinggal Pertamina dan Pertamina Turbo," lanjutnya.

Lebih lanjut Ahok mengatakan, jika BBM yang dijual Pertamina dan Pertamina Turbo, maka tentunya ini akan berdampak baik pada lingkungan. "Agar tidak terjadi pencemaran lingkungan BBM oktan rendah," ungkapnya.

Bila ini dilakukan, maka RI bisa mengikuti langkah negara-negara tetangga yang menjual bensin dengan nilai oktan 92. Bahkan, Malaysia saja telah menyediakan bensin dengan minimal nilai oktan 95.

Untuk BBM jenis jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 88 atau Premium yang sudah lama diwacanakan untuk dihapus, dirinya mendukung penghapusan bensin Premium ini. Bila subsidi masih berbasis komoditas, maka dia mengusulkan agar subsidi digeser ke Peralite yang memiliki nilai oktan lebih tinggi. "Harusnya Public Service Obligation (PSO), subsidi pindah ke Peralite yang lebih ramah lingkungan. Dan saat ini penjualan BBM sudah 80% adalah Peralite," jelasnya.

Sebelumnya, wacana mengenai penghapusan BBM jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 88 atau Premium sudah lama bergulir, namun tak kunjung direalisasikan. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonogoro menilai pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan rencana penghapusan.

Dia menyampaikan jika BBM jenis Premium dihapus, maka masyarakat tidak akan ada opsi lagi membeli Premium. Dengan demikian, mau tidak mau mereka akan beralih. Misalnya konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kg yang dulu pernah dilakukan, dan akhirnya masyarakat pun mau beralih.

"Masyarakat ini kalau pemerintah konsisten nggak ada opsi, seperti dulu awal-awal program konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kg, kerasnya masyarakat menolak, tapi pemerintah tidak menyediakan, lambat laun

terbiasa," paparnya.

Menurutnya, sangat wajar ketika kebijakan baru diterapkan, maka pada mulanya menimbulkan kontroversi di masyarakat. Namun menurutnya lambat laun masyarakat akan terbiasa dengan sendirinya. "Kalau Premium ini benar-benar nggak ada dan yang tersedia adalah merek yang lain RON 90, entah Pertamina pakai Peralite atau pelaksana lain dengan merek yang beda, kalau yang tersedia yang paling murah itu ya masyarakat akan ke sana," jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah menganggarkan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg pada 2022 sebesar Rp 77,55 triliun, naik 15,9% dari tahun ini yang diproyeksikan sebesar Rp 66,94 triliun.

Secara rinci, berdasarkan Buku Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, subsidi untuk BBM tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 11,3 triliun, turun 33,5% dari outlook subsidi 2021 sebesar Rp 17 triliun.

Sementara subsidi LPG 3 kg pada 2022 diusulkan sebesar Rp 66,3 triliun, melonjak 33% dari outlook subsidi 2021 sebesar Rp 49,9 triliun. Adapun realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg selama kurun waktu 2017-2020 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,5% per tahun dari Rp 47,05 triliun pada 2017, lalu pada 2020 naik tipis menjadi Rp 47,73 triliun.

"Dalam outlook tahun 2021, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp 66.937,8 miliar (Rp 66,94 triliun), atau menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020," bunyi nota keuangan tersebut.

Peningkatan ini dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, terutama harga minyak mentah

Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah, perkembangan volume konsumsi, serta pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan besaran subsidi tetap solar. Sejak tahun 2017-2021 kebijakan subsidi solar mengalami beberapa kali penyesuaian dengan memperhatikan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro terutama ICP, dan nilai tukar rupiah.

Inggris Kehabisan Bensin

Di negara lain, British Petroleum (BP) mengatakan hampir sepertiga dari pom bensin Inggris telah kehabisan dua jenis BBM utama sejak Minggu (26/9) karena pembelian panik memaksa pemerintah untuk menanggukkan undang-undang persaingan dan memungkinkan perusahaan untuk bekerja sama untuk mengurangi kelangkaan.

Antrean kendaraan mengular di pom bensin untuk hari ketiga berturut-turut saat pengendara menunggu, beberapa berjam-jam, untuk mengisi bahan bakar setelah perusahaan minyak melaporkan kurangnya pengemudi menyebabkan masalah transportasi dari kilang ke pom bensin. Beberapa operator harus menjatah pasokan dan yang lainnya menutup SPBU.

"Dengan permintaan yang kuat yang terlihat selama dua hari terakhir, kami memperkirakan bahwa sekitar 30% situs di jaringan ini saat ini tidak memiliki bahan bakar kelas utama," kata BP, yang mengoperasikan 1.200 pom bensin di Inggris, dikutip dari Reuters, Senin (27/9). "Kami sedang bekerja untuk memasok secepat mungkin."

Petrol Retailers Association mengatakan pada Senin, stasiun pengisian bensin dan diesel Inggris kehabisan stok, dengan beberapa kelompok besar di kota-kota Inggris melaporkan 50% hingga 90% pom bensin

kehabisan BBM.

Kepanikan bahan bakar terjadi saat Inggris menghadapi beberapa krisis: lonjakan harga gas internasional yang memaksa perusahaan energi gulung tikar, kekurangan karbon dioksida terkait yang mengancam produksi daging, dan kekurangan pengemudi truk yang mengacaukan pengecer BBM dan menyebabkan bahan pokok di supermarket kosong.

Grup minyak Anglo-Belanda, Shell, mengatakan bahwa mereka juga melihat peningkatan permintaan bahan bakar. Sebagai tanggapan, menteri bisnis Kwasi Kwarteng mengatakan dia menanggukkan undang-undang persaingan untuk memungkinkan perusahaan berbagi informasi dan mengkoordinasikan tanggapan mereka.

"Langkah ini akan memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara konstruktif dengan produsen bahan bakar, pemasok, pengangkut, dan pengecer untuk memastikan gangguan diminimalkan sejauh mungkin," kata departemen bisnis.

Menteri Transportasi Grant Shapps sebelumnya meminta semua pihak tenang, dengan mengatakan kelangkaan itu murni disebabkan oleh pembelian panik, dan situasi akan teratasi dengan sendirinya karena bahan bakar tidak dapat ditimbun. "Ada banyak bahan bakar, tidak ada kekurangan bahan bakar di dalam negeri," kata Shapps kepada Sky News.

"Jadi yang paling penting sebenarnya adalah orang-orang melakukan seperti biasanya dan mengisi mobil mereka seperti biasanya, maka Anda tidak akan memiliki antrean dan Anda juga tidak akan kekurangan di pompa."

Setelah bertemu Kwarteng, tokoh industri termasuk perwakilan dari Shell dan Exxon Mobil Corp mengatakan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh departemen bisnis, menekankan tidak ada kekurangan BBM nasional. (ist,ins)

REALISASI SUBSIDI LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN TAHUN 2020

Dipengaruhi Harga Keekonomian Dan Realisasi Penyaluran Volume Barang Bersubsidi Subsidi Energi

SUBSIDI ENERGI

Triliun Rupiah

2021

76,1% 84,1 ↑ +37,3%

2020

64,1% 61,3 ↓ -18,8%

■ Real s.d. Agustus ■ % Thd Pagu

Realisasi subsidi energi lebih tinggi, termasuk realisasi diskon listrik untuk rumah tangga dan UMKM Rp5,6T

SUBSIDI NON ENERGI

Triliun Rupiah

2021

54,9% 35,6 ↑ +4,6%

2020

35,3% 34,3 ↑ +21,4%

■ Real s.d. Agustus ■ % Thd Pagu

ealisasi Subsidi Non Energi lebih tinggi didukung oleh percepatan pelaksanaan terutama untuk program PEN, seperti Subsidi Bunga KUR dan Subsidi UP.

REALISASI PENYALURAN S.D. JUL

	2020	2021
BBM (Solar & Mitan) (Ribu/KL)	8.095,4	8.848,1
LPG Tabung 3 kg (luta/Kg)	4.106,5	4.299,8
Pelanggan Subsidi Listrik (luta Pelanggan)	36.57	37.68
Volume Konsumsi Listrik Subsidi (Twh)	34.98	36.60

REALISASI PENYALURAN S.D. AGT

Subsidi Bunga KUR (Ribu/KL)	3,2	4,8
Penyaluran Kredit KUR (luta/Kg)	110,4	176,3
SBUM (Ribu Unit Rumah)	22,5	88,7

NOW!!!Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURHj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURKUSNADI, SH., M.Hum
KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURH. ANWAR SADAD, M.Ag
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURSAHAT TUA P. SIMANJUNTAK, SH
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

MOMENTUM TEPAT LAHIRNYA RAPERDA PERLINDUNGAN PMI DAN KELUARGANYA

SURABAYA - Penyelesaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya menemukan urgensi dan mometumnya yang tepat. Hal ini seiring dengan banyaknya PMI asal Jawa Timur yang kembali ke kampung halamannya.

Dari data terbaru, selama 2021 setidaknya ada 4.3176 PMI yang putus kontrak maupun dideportasi. Dari jumlah tersebut, jumlah yang putus kontrak relatif lebih sedikit yaitu kurang dari 5%, sedangkan yang terbanyak adalah yang non prosedural dan dideportasi.

"Ini momentumnya pas. Kita juga hendak mengantar agar yang non prosedural ini bisa dicegah kalau toh terjadi setidaknya bisa dilayani dengan baik," kata Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, saat melaporkan Raperda inisiatif Perlindungan PMI dan Keluarganya dalam rapat paripurna, Senin (27/9/2021).

Hikmah menyampaikan sebelumnya ada kabar baik bahwa Bandara Internasional Juanda tidak lagi menjadi titik kepulangan deportasi PMI dan difokuskan di Manado dan Jakarta, namun kabar terakhir kembali dibuka. Dia juga menyampaikan bahwa kepulangan PMI pada gelombang kedua Covid-19 sudah mencapai 30 ribu PMI dideportasi baik yang secara prosedural maupun non prosedural.

Kondisi tersebut, khususnya untuk PMI yang non prosedural karena jumlahnya cukup banyak maka membutuhkan penanganan yang luar biasa ekstra ketat, ekstra harus manusiawi karena mereka dalam posisi yang sangat mustad afin.

Hikmah yang merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menandakan bahwa Raperda tentang Perlindungan PMI dan Keluarganya ini merupakan inisiatif DPRD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. "Setelah ini selesai berarti kami membantu setidaknya untuk menaikkan indeks demokrasi Jawa Timur yang turun drastis karena tidak adanya Perda inisiatif yang disahkan," tandasnya.

Setelah melalui proses pembahasan akan dilanjutkan dengan public hearing guna menyerap aspirasi masya-

rahat. Pembahasan Raperda ini juga telah disesuaikan dengan kewenangan daerah provinsi Jawa Timur dan perkembangan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan PMI asal Jawa Timur dan keluarganya.

Untuk itu, setidaknya ada lima politik hukum yang hendak diwujudkan dalam pembentukan Raperda tersebut. Yaitu, pertama, meningkatkan jumlah PMI asal Jawa Timur yang bekerja pada jabatan formal atau skill melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemerintah dan pihak swasta yang berjejaring dan tidak dibebani biaya pelatihan. Kemudian, mengintensifkan kerjasama dengan jaringan pasar kerja formal di luar negeri lewat berbagai lini.

Kedua, meningkatkan layanan penempatan dan perlindungan PMI serta penyelesaian permasalahan PMI sebelum dan setelah bekerja. Ketiga, memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak PMI dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja.

"Mengapa keluarga PMI? karena PMI hanya bisa bekerja dengan baik dan produktif apabila keluarganya, anak-anaknya, suami yang ditinggal, istri yang ditinggal dalam kondisi baik-baik saja," katanya.

Keempat, meningkatkan peran pemerintah Kabupaten dan Kota serta pemerintah desa asal PMI serta partisipasi masyarakat dunia usaha dan dunia industry, perusahaan, organisasi profesi dan Lembaga Pendidikan termasuk tinggi untuk menjadi bagian dari gerakan inklusi sosial bagi PMI dan keluarganya dengan berbagai respon-respon yang konstruktif.

Dan kelima, mencegah keberangkatan PMI non prosedural melalui pembentukan satuan tugas pencegahan PMI non-prosedural. "Kalau hari ini dideportasi oleh Malaysia 30 ribu lebih banyak dari Sampang, lalu Bangkalan, lalu Pamekasan, lalu Jember, tentu ini menjadi keprihatinan kita semua. Bagaimana kedepannya berangkat non-prosedural ini tidak menjadi pilihan bagi warga kita," katanya.

Kemudian, untuk mewujudkan politik hukum pembentukan Perda tersebut, maka diperlukan sinergitas

antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten kota, pemerintah Desa asal PMI, serta masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan Raperda ini menghasilkan beberapa hal yang harus dilakukan Provinsi Jawa Timur setelah perda ini diundangkan. Kemudian juga harus diikuti dengan kebijakan anggaran. Jika tidak ada anggaran, maka nantinya Perda ini hanya akan menjadi macan kertas.

Di antara kewajiban Pemprov Jatim adalah menambah jumlah Balai latihan kerja (BLK) khusus untuk daerah basis PMI. Kemudian, melakukan pelatihan kerja bagi calon PMI asal Jawa Timur serta menanggung biaya untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang diselenggarakan oleh BLK Provinsi atau Swasta.

"Hari ini ternyata PJTKI kita banyak terpukul karena Covid-19 yang berkepanjangan. Hadirnya dana pelatihan itu disambut dengan gembira dan Jawa Timur satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberikan pos anggaran itu," kata Hikmah.

Pemprov Jatim juga harus melakukan fasilitasi kepulangan PMI dan keluarganya asal Jawa Timur jika terjadi hal darurat. Melakukan fasilitasi penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi. Membuka layanan pengaduan PMI di debarkasi yang diberikan secara langsung maupun secara online. Melakukan pendataan PMI dan keluarganya.

Kemudian, melakukan rehabilitasi sosial, integrasi sosial, serta pemberdayaan bagi PMI dan keluarganya. Melakukan pemenuhan keluarga PMI, suami, istri, anak, dan orang tua termasuk hubungan karena putusan dan penetapan pengadilan baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama PMI di luar negeri. Pemprov juga harus membentuk dan serta juga melakukan optimalisasi Satgas pencegahan PMI non-prosedural. Penanganan ini betul-betul harus serius, Hikmah menilai, masalah ini luar biasa multiplayer efeknya.



Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih.

Pemprov juga diharapkan membentuk rumah singgah perlindungan PMI sebagai pusat pelayanan perlindungan PMI dan keluarganya yang bermasalah. Serta, memberikan perlindungan hukum sosial dan ekonomi serta jaminan sosial bagi PMI dan keluarganya. Selain itu juga masih banyak yang harus dilakukan Pemprov Jatim guna memberikan perlindungan pada PMI dan keluarganya.

Sementara itu Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, menjelaskan bahwa problem ketenagakerjaan itu sering dilihat secara sporadis dan tidak menjadi sebuah tema yang sistematis. Akibatnya, isu-isu ketenagakerjaan baru mencuat setelah ada kasus. Seperti korban PHK dan jadi korban trafficking.

Menurutnya, isu ketenagakerjaan itu dilihat dari problemnya seperti apa, kemudian dilakukan penanganan yang sesuai hingga menemukan solusi yang tepat. "Lha dalam Raperda ini akan diurus dari hulu hingga hilir," tegas Himawan.

Di sisi lain, kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota yang menjadi kantong-kantong PMI juga sangat penting untuk disinergikan. Dia juga memberikan masukan terkait pengorganisasian yang dinilai tak kalah pentingnya dengan substansi.

Kalau dimungkinkan, masalah ketenagakerjaan juga menjadi isu sentral dalam visi dan misi kepala daerah terkait pentingnya pengorganisasian ini. "Yang terjadi selama ini, ketika masalah ketenagakerjaan menjadi isu politis pasti tidak ada anggarannya," pungkas Himawan. (ufi/adv)